

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2015**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 – 2019, yang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Diharapkan dengan disusunnya RKT 2015, dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Jakarta, Februari 2014

Direktur Jenderal,



Ir. Syukur Iwantoro, MS., MBA

NIP. 9590503 198403 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Sasaran.....	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	3
A. Visi dan Misi.....	3
B. Tujuan dan Sasaran.....	3
C. Strategi.....	4
D. Kebijakan.....	4
BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	6
A. Program dan Penjabaran ke Dalam Kegiatan.....	6
B. Pelaksanaan Kegiatan.....	8
BAB IV PENUTUP.....	10
LAMPIRAN.....	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan dinamika permintaan produk peternakan, penyediaan bibit ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan, serta tuntutan perubahan manajemen pembangunan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat. Sedangkan isu global yang sedang dihadapi adalah perubahan iklim global, krisis pangan dan energi dunia, harga pangan serta energi meningkat.

Dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukkan bahwa sub sektor peternakan memiliki peran cukup strategis utamanya dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan di pedesaan. Namun besarnya peran tersebut, ternyata belum dinikmati oleh para pelaku usaha peternakan utamanya masyarakat peternak sendiri.

Pada era reformasi dan otonomi daerah, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah berupaya, mengimplementasikan program dan kegiatan dilapangan guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana, layanan berkualitas dan pemanfaatan sumber daya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Sehingga, untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasinya diperlukan sumberdaya manusia, sarana/peralatan dan pendanaan yang memadai serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015 dalam kerangka pencapaian kinerja program tahun 2015 - 2019, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab atas satu program dari 12 program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian yaitu **"Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat."** Pencapaian program tersebut akan ditempuh melalui 6 kegiatan utama yaitu (i) peningkatan produksi bibit ternak; (ii) peningkatan produksi ternak; (iii) peningkatan produksi pakan ternak; (iv) pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ); (v) Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan; dan (vi) peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk acuan pencapaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2015, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan 2015 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk memandu penyusunan rencana kegiatan tahun 2015 yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015 adalah :

- a. Memberikan gambaran rencana prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
- b. Menyusun indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun.
- c. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya rencana kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam satu tahun
2. Terjabarkannya program ke dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pengungkit pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
3. Tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Kementerian Pertanian Tahun 2015 adalah:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2015

A. Visi dan Misi

Visi yang tertuang dalam Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah: *"Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan Kemandirian dan Keamanan Pangan Asal ternak"*.

Profesional menunjukkan kemampuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendorong dan memfasilitasi:

1. Peningkatan populasi dan produksi ternak;
2. Penyediaan benih dan bibit bermutu;
3. Penyediaan pakan bermutu;
4. Penjaminan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan;
5. Penjaminan produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, dan Halal) dan berdaya saing;
6. Pelayanan prima; dan
7. Peningkatan kesejahteraan peternak.

Sedangkan arti kemandirian pangan asal ternak adalah kemampuan memproduksi pangan asal ternak dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan yang cukup dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan kearifan lokal secara bermartabat.

Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. Melaksanakan kebijakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

B. Tujuan dan Sasaran Tahun 2015-2019

Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam periode tahun 2014-2015, yaitu.

1. Meningkatkan populasi dan produksi ternak yang berdaya saing;
2. Memfasilitasi penyediaan bahan baku industri;
3. Meningkatkan status kesehatan hewan;
4. Menjamin produk hewan yang Aman, Sehat Utuh, dan Halal (ASUH);
5. Mengembangkan komoditas dan produk peternakan berdayasaing dan berorientasi ekspor; dan
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak;
7. Mengembangkan sistem bioindustri peternakan berkelanjutan; dan mencegah penularan penyakit hewan ke manusia.

Sasaran pembangunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diuraikan sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan produksi pangan asal ternak: daging unggas, daging sapi-kerbau, telur, susu;
2. Tercapainya peningkatan kontribusi susu dalam negeri;
3. Berkembangnya produk industri peternakan prospektif (vaksin, semen beku, obat hewan, kulit, bulu, sarang burung walet, tulang/tanduk);
4. Berkembangnya produk biogas dan pupuk organik berbasis peternakan
5. Berkembangnya komoditas ternak berorientasi ekspor (kambing, domba, babi dan unggas).

C. Strategi

Strategi yang akan diterapkan dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah:

1. Pengembangan kawasan komoditas peternakan (komunal, skala usaha, peternakan-bioindustri berkelanjutan).
2. Penguatan infrastruktur peternakan dan keswan serta revitalisasi kelembagaan usaha/skala kepemilikan ternak menuju koperasi.
3. Penguatan tata niaga dan pemberian insentif peternakan.
4. Peningkatan status kesehatan hewan
5. Peningkatan daya saing produk peternakan
6. Perlindungan, perbaikan dan pemanfaatan plasma nutfah lokal.
7. Penguatan regulasi mendorong kemandirian dan kemampuan peternak.
8. Mendorong pengembangan sistem investasi melalui: *inti-plasma, sub contracting, franchising, general trading, distribution and agency, profit sharing, operational cooperation, joint ventures, outsourcing.*

D. Kebijakan

1. Kebijakan Umum

Arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2015-2019 adalah untuk : (i) menjamin produksi benih dan bibit ternak; (ii) meningkatkan populasi dan produktifitas ternak; (iii) meningkatkan produksi pakan ternak; (iv) meningkatkan status kesehatan hewan; (v) menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; (vi) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Kebijakan Teknis

a. Kebijakan teknis ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan diarahkan untuk: (i) mengoptimalkan kelembagaan perbibitan dan sertifikasi; (ii) pewilayahan sumber bibit berdasarkan potensi dan agroekosistemnya; (iii) pengembangan kawasan/sentra sumber bibit; (iv) pelestarian sumber daya genetik secara berkelanjutan; (v) peningkatan penerapan teknologi perbibitan; dan (vi) pengembangan usaha dan investasi perbibitan.

- b. Kebijakan teknis populasi dan produktifitas ternak diarahkan untuk: (i) meningkatkan populasi dan produktifitas ternak ruminansia dan non ruminansia ; (ii) melaksanakan revitalisasi persusuan; (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan (iv) pengembangan kelembagaan dan usaha.
- c. Kebijakan teknis produksi pakan ternak diarahkan untuk: (i) menambah penyediaan pakan dan air; (ii) mengembangkan teknologi dan industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal; (iii) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan; serta (iv) pengembangan dan pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, ex tambang.
- d. Kebijakan teknis kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan perlindungan hewan, pengamatan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan; (ii) meningkatkan pelayanan kesehatan hewan; (iii) meningkatkan kualitas dan kuantitas vaksin, obat hewan dan bahan biologik lainnya; (iv) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner.
- e. Kebijakan teknis keamanan produk hewan diarahkan untuk; (i) menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner; (ii) meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing produk hewan; (iii) meningkatkan penerapan kesrawan.
- f. Kebijakan peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerjasama internasional; (iv) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan

1. Program

Program utama dari Ditjen PKH adalah "Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat". Program ini menjadi rujukan strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat aksi atau operasional.

Program berisi satu atau beberapa kegiatan, yang dilaksanakan oleh satuan di bawah unit kerja Eselon I dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan strategi yang telah dirumuskan dan program utama Ditjen PKH.

Outcome yang diharapkan dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah (i) terpenuhinya pangan asal ternak; (ii); meningkatnya kesejahteraan peternak; dan (iii) meningkatnya daya saing peternakan. Outcome tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu:

- a. Kegiatan peningkatan produksi benih dan bibit ternak
Sasaran: Tercapainya peningkatan produksi benih dan bibit ternak
- b. Kegiatan peningkatan produksi ternak :
Sasaran: Tercapainya peningkatan kelahiran dan produksi ternak
- c. Kegiatan peningkatan produksi pakan ternak
Sasaran: Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak
- d. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.
Sasaran: meningkatnya status kesehatan hewan.
- e. Kegiatan penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.
Sasaran: Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.
- f. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sasaran: Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis.

2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja setingkat Eselon II sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

Masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau agar menghasilkan keluaran (*output*). Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. Sedangkan hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang merefleksikan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan yang mencerminkan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produksi benih dan bibit ternak. Kegiatan ini mencakup empat kegiatan dengan output sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan produksi benih ternak (dosis),
 - 2) Peningkatan bibit ternak (ekor),
 - 3) Peningkatan kelembagaan perbibitan (kelompok), dan
 - 4) Penguatan wilayah perbibitan (lokasi).
- b. Peningkatan produksi ternak. Kegiatan ini mencakup lima kegiatan dengan output sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan Budidaya Sapi Potong, Sapi perah dan Kerbau (Kelompok/ekor),
 - 2) Optimalisasi IB dan Gertak Berahi (akseptor)
 - 3) Pengembangan Ruminansia Kecil (Kelompok)
 - 4) Pengembangan Budidaya Unggas dan Aneka Ternak (Kelompok/ekor)
 - 5) Penguatan kelembagaan peternak(kegiatan).
- c. Peningkatan produksi pakan ternak. Kegiatan ini mencakup tiga output sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan hijauan pakan ternak (stek),
 - 2) Pengembangan pakan olahan / bahan pakan (ton),
 - 3) Pengawasan mutu dan keamanan pakan (sampel),
- d. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis . Kegiatan ini mencakup lima output sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis/PHMSZ (dosis)
 - 2) Penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan sertifikasi obat hewan (sampel),
 - 3) Peningkatan Produksi Vaksin, Obat Hewan dan Bahan Biologik (dosis),
 - 4) Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (wilayah), dan
 - 5) Penguatan Kelembagaan Otoritas veteriner (unit)

- e. Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Kegiatan ini mencakup empat output sebagai berikut:
 - 1) Penjamin Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) dan Berdaya Saing (unit/sampel)
 - 2) Pencegahan penularan zoonosis (laporan/sampel),
 - 3) Penerapan Kesejahteraan Hewan (laporan), dan
 - 4) Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan Lainnya (unit usaha).
- f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini mencakup dua output sebagai berikut:
 - 1) Penerapan SAKIP (dokumen),
 - 2) Pengembangan data base (dokumen)
 - 3) Kegiatan kesekretariatan lainnya (bulan)

Rencana kinerja tahunan dan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015, disajikan pada Lampiran-1

B. Pelaksanaan Kegiatan

a. Fasilitasi Kegiatan Umum

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan program pembangunan peternakan dan keswan Tahun 2015, fasilitasi kegiatan pembangunan peternakan diarahkan pada : pemenuhan pelayanan teknis minimal kesehatan hewan dan perbibitan serta peningkatan usaha produktif bidang peternakan dan keswan
- b. Lokasi fasilitasi kegiatan teknis minimal diseluruh Indonesia
- c. Pembangunan komoditas peternakan difokuskan pada 8 komoditas strategis dan unggulan yaitu : sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, itik, ayam lokal, dan babi
- d. Fasilitasi kegiatan dan komoditas diarahkan pada lokasi kawasan komoditas peternakan yang sudah ditetapkan (30 % dari total anggaran). Lokasi kawasan pengembangan komoditas mencakup : 144 kab/kota di 22 Propinsi pada 71 kawasan (lokasi kawasan terlampir)

b. Pelaksanaan Kegiatan Teknis

a. produksi ternak.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya kelahiran ternak dan peningkatan produktifitas daging, telur dan susu. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis, ditempuh melalui penguatan/pemberdayaan kelompok, penguatan sarana dan prasarana, pengawalan dan pendampingan, bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Konsentrasi.

b. Pelaksanaan kegiatan pakan ternak.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan pakan ternak (hijauan dan olahan). Fasilitasi kegiatan ini berupa penguatan dan pemberdayaan kelompok, penguatan sarana dan prasarana pakan, pengawasan dan pengujian mutu pakan, bimtek, penguatan kelembagaan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Konsentrasi dan Kantor Daerah.

c. Pelaksanaan kegiatan perbibitan ternak

Sasaran strategis kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan produksi benih dan bibit ternak. Fasilitasi kegiatan ini berupa penguatan dan pemberdayaan kelompok, penguatan sarana dan prasarana pakan, produksi bibit dan benih, pengawasan dan pengujian mutu bibit, bimtek, penguatan kelembagaan, pelayanan teknis minimal perbibitan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Konsentrasi dan Kantor Daerah (BBIB, BIB, BBPTU, BPTU)

d. Pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan

Sasaran strategis kegiatan ini terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. Fasilitasi kegiatan ini berupa penguatan sarana dan prasarana kesehatan hewan, produksi vaksin bahan biologik dan obat hewan, pengujian dan sertifikasi obat hewan, penyidikan dan pengujian penyakit, penanganan dan pengendalian penyakit hewan, bimtek, penguatan kelembagaan, pelayanan teknis minimal keswan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Konsentrasi dan Kantor Daerah (BBVet, Bvet, Pusvetma, BBPMSOH)

e. Pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner

Sasaran strategis kegiatan ini terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Fasilitasi kegiatan ini berupa penguatan sarana dan prasarana kesmavet dan pascapanen, pengujian dan pengawasan mutu produk, bimtek, penguatan kelembagaan, penerapan kesrawan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Konsentrasi dan Kantor Daerah (BBVet, Bvet, BPMP SH)

f. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan

Sasaran strategis kegiatan ini adalah terlaksananya SAKIP dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan program. Fasilitasi kegiatan ini berupa penguatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas dukungan input (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja). Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Konsentrasi dan Kantor Daerah

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai sasaran program yang ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana kinerja tahunan ini merupakan turunan dari rencana strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berjangka waktu satu tahun. Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan 6 kegiatan sebagai bagian dalam pencapaian Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat untuk mendukung empat target sukses Kementerian Pertanian.

Lampiran-1. Rencana Kinerja Tahunan Dan Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2015

NO	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	ANGGARAN TAHUN 2015 (Rp. 000)	
1	Program Pemenuhan Pangan Hewani Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1	Produksi Daging (000 ton)	3.927,02	3.160.628.799
		2	Produksi Susu (000 ton)	2.497,37	
		3	Produksi Telur (000 ton)	799,97	
2	Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak	1	Pengembangan Budidaya Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (kelompok)	368	1.207.730.793
		2	Optimalisasi IB (dosis)	1.829.753	
		3	Intensifikasi Kawin Alam/InKA (ekor)	2.220	
		4	Pengembangan Ruminansia Kecil (kelompok)	186	
		5	Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak (kelompok)	226	
		6	Penguatan Kelembagaan Peternak (Kegiatan)	253	
3	Kegiatan : Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (ton)	1.900	864.000.000
		2	Cerbang Patau (gerakan Pengembangan Pakan Berkualitas) (stek)	3.403.000	
		3	Pengembangan Integrasi Ternak (klpk)	173	
		4	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan (klpk)	527	
		5	Pengembangan Mutu dan Keamanan Pakan (sampel)	8.381	
4	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	1	Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis/PHMSZ (dosis)	9.604.724	265.5295.260
		2	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan (sampel)	224,09	
		3	Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner (unit)	969	
		4	Produksi Vaksin dan Bahan Biologik (dosis)	8.377.775	
		5	Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional /SISKESWANNAS (Provinsi)	321	
5	Kegiatan : Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	1	Peningkatan Produksi Benih Ternak (dosis)	4.800.000	371.586.897
		2	Peningkatan Bibit Ternak (ekor)	455.678	
		3	Penguatan Kelembagaan Perbibitan (kelompok)	260	
		4	Penguatan Wilayah Perbibitan (Lokasi)	35	
6	Kegiatan : Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	1	Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (laporan)	142	171.334.032
		2	Pencegahan Penularan Zoonosis (laporan)	371	
		3	Penerapan Kesejahteraan Hewan (laporan)	57	
		4	Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan Prospektif (unit usaha)	22	
		5	Pemeriksaan dan Pengujian PH ASUH (sampel)	40.320	
		6	Fasilitasi RPH dan Pascapanen (unit)	37	
7	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	1	Penerapan SAKIP (lap)	753	280.398.198
		2	Kegiatan kesekretariatan lainnya (bulan)	12	

Lampiran-2. Target Populasi Ternak Tahun 2015

(000 ekor)

No	Jenis Ternak	Tahun 2015
1	Sapi Potong	13.245
2	Sapi Perah	462
3	Kerbau	1.121
4	Kambing	19.944
5	Domba	17.011
6	Babi	7.970
7	Ayam Buras	277.274
8	Ayam Petelur	188.688
9	Ayam Pedaging	2.557.542
10	Itik	46.113

Lampiran-3. Target Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2015

No	Jenis Ternak	Tahun 2015
A	Daging	3.827,02
1	Sapi (karkas)	509,68
	Sapi (daging)	407,74
2	Kerbau (karkas)	35,61
	Kerbau (daging)	28,49
3	Kambing	66,19
4	Domba	48,32
5	Babi	334,89
6	Ayam Buras	326,94
7	Ayam Petelur	69,53
8	Ayam Pedaging	2.398,97
9	Itik	36,89
B	Telur	2.983,52
1	Ayam Buras	201,36
2	Ayam Petelur	2.497,37
3	Itik	284,79
C	Susu	799,97

Lampiran-4. Lokasi Pengembangan Kawasan Komoditas Ternak

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS		
1	ACEH	1 ACEH 1	1 Kab. Aceh Jaya	Sapi Potong		
			2 Kab. Bener Meriah			
			3 Kab. Aceh Besar			
		2 ACEH 2	4 Kab. Aceh Tamiang	Sapi Potong		
2	SUMATERA UTARA	3 SUMUT 1	5 Kab. Langkat	Sapi Potong		
			6 Kab. Deli Serdang			
		4 SUMUT 2	7 Kab. Samosir	Kerbau		
			8 Kab. Padang Lawas			
		5 SUMUT 3	9 Kab. Simalungun	Kambing		
			10 Kab. Asahan			
		6 SUMUT 4	11 Kab. Tapanuli Utara	Babi		
			12 Kab. Humbang Hasundutan			
3	SUMATERA BARAT	7 SUMBAR 1	13 Kab. Pasaman Barat	Sapi Potong		
			14 Kab. Limapuluhkota			
			15 Kab. Agam			
		8 SUMBAR 2	16 Kab. Pesisir Selatan	Kerbau		
			17 Kab. Sijunjung			
4	RIAU	9 RIAU 1	18 Kab. Rokan Hilir	Sapi Potong		
			19 Kab. Rokan Hulu			
			20 Kab. Kampar			
		10 RIAU 2	21 Kab. Indragili Hulu	Sapi Potong		
			22 Kab. Kuantan Singingi			
			23 Kab. Pelalawan			
			24 Kab. Slak			
				11 RIAU 3	25 Kab. Kepulauan Meranti	Sapi Potong
				12 RIAU 4	26 Kep. Indragiri Hilir	Sapi Potong
		5	JAMBI	13 JAMBI 1	27 Kab. Sarolangun	Sapi Potong
28 Kab. Bungo						

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS
6	SUMATERA SELATAN	14 SUMSEL 1	29 Kab. OKI	Kerbau
7	BENGKULU	15 BENGKULU 2	30 Kab. Kepahiyang	Kambing
8	LAMPUNG	16 LAMPUNG 1	31 Kab. Lampung	Sapi Potong
			32 Kab. Lampung Timur	
			33 Kota Bandar Lampung	
			34 Kab. Lampung	
9	JAWA BARAT	17 CIAYUMAJAKUNING	35 Kab. Cirebon	Sapi Potong
			36 Kota Cirebon	
			37 Kab. Indramayu	
			38 Kab. Kuningan	
			39 Kab. Majalengka	
		18 PURWASUKA	40 Kab. Subang	Sapi Potong
		19 CEKUNGAN BANDUNG	41 Kab. Bandung Barat	Sapi Perah
			42 Kab. Bandung	
		20 PRIANGAN TIMUR	43 Kab. Garut	Domba
			44 Kab. Tasikmalaya	
			45 Kab. Ciamis	
10	JAWA TENGAH	21 TENGKEB	46 Kab. Kebumen	Sapi Potong
		22 TENGSEMARTIGA	47 Kab. Semarang	Sapi Perah
			48 Kota Salatiga	
		23 JALITILUT	49 Kab. Grobogan	Sapi Potong
			50 Kab. Blora	
		24 JALIGARA	51 Kab. Klaten	Sapi Potong
			52 Kab. Sragen	
			53 Kab. Sukoharjo	
		25 TENGBREGAL	54 Kab. Brebes	Kerbau
			55 Kab. Tegal	
		26 TENGPURBA	56 Kab. Purworejo	Kambing
			57 Kab. Banyumas	
		27 TENGBANJAR	58 Kab. Banjarnegara	Domba

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS
11	DI YOGYAKARTA	28 DIY 1	59 Kab. Gunung Kidul	Sapi Potong
			60 Kab. Sleman	
			61 Kab. Kulonprogo	
			62 Kota Yogyakarta	
12	JAWA TIMUR	29 JATIM 1	63 Kab. Sumenep	Sapi Potong
			64 Kab. Bangkalan	
			65 Kab. Pamekasan	
		30 JATIM 3	66 Kab. Malang	Sapi Perah
			67 Kota Batu	
		31 JATIM 4	68 Kab. Lamongan	Sapi Potong
		32 JATIM 5	69 Kab. Tuban	Sapi Potong
		33 JATIM 6	70 Kab. Lumajang	Kambing
		34 JATIM 7	71 Kab. Bondowoso	Domba
		35 JATIM 8	72 Kab. Trenggalek	Kambing
36 JATIM 9	73 Kab. Jombang	Kambing		
13	BANTEN	37 BANTEN 1	74 Kab. Tangerang	Sapi Potong
			75 Kab. Lebak	
		38 BANTEN 2	76 Kab. Pandeglang	Kerbau
			77 Kab. Serang	
		39 BANTEN 3	78 Kota Serang	Kerbau
14	BALI	40 TAJEM	79 Kab. Tabanan	Kambing
			80 Kab. Jembrana	
		41 BABAGI	81 Kab. Badung	Babi
			82 Kota Denpasar	
			83 Kab Gianyar	
			84 Kab Bangli	
		42 BUKAK	85 Kab. Klungkung	Sapi Potong
			86 Kab. Karangasem	
			87 Kab. Buleleng	
		15	NUSA TENGGARA BARAT	43 NTB 1
89 Kab. Sumbawa				
90 Kab. Dompu				
	91 Kab. Sumbawa Barat			
44 NTB 2	92 Kab. Lombok Tengah			Sapi Potong
	93 Kab. Lombok Timur			

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS
11	DI YOGYAKARTA	28 DIY 1	59 Kab. Gunung Kidul	Sapi Potong
			60 Kab. Sleman	
			61 Kab. Kulonprogo	
			62 Kota Yogyakarta	
12	JAWA TIMUR	29 JATIM 1	63 Kab. Sumenep	Sapi Potong
			64 Kab. Bangkalan	
			65 Kab. Pamekasan	
		30 JATIM 3	66 Kab. Malang	Sapi Perah
			67 Kota Batu	
		31 JATIM 4	68 Kab. Lamongan	Sapi Potong
32 JATIM 5	69 Kab. Tuban	Sapi Potong		
33 JATIM 6	70 Kab. Lumajang	Kambing		
16	NUSA TENGGARA TIMUR	45 TIMOR	94 Kab. Kupang	Sapi Potong
			95 Kota Kupang	
			96 Kab. TTS	
			97 Kab. TTU	
			98 Kab. Belu	
		99 Kab. Malaka		
		46 FLORES BAGIAN B	100 Kab. Ngada	Sapi Potong
			101 Kab. Nagekeo	
			102 Kab. Manggarai Timur	
		47 SUMBA	103 Kab. Sumba Timur	Sapi Potong
104 Kab. Sumba Tengah				
105 Kab. Sumba Barat				
106 Kab. Sumba Barat Daya				
17	KALIMANTAN SELATAN	48 KALSEL 1	107 Kab. Hulu Sungai Tengah	Sapi Potong
			108 Kab. Banjar	
			109 Kab. Tanah Laut	
		49 KALSEL 2	110 Kab. Kotabaru	Sapi potong
			111 Kab. Barito Kuala	
		50 KALSEL 4	112 Kab. Hulu Sungai Utara	Kerbau
113 Kab. Hulu Sungai Selatan				
18	KALIMANTAN TIMUR	51 BERSAMA NEGARA SALAM	114 Kab. Paser	Sapi potong
			115 Kab. Kutai Kartanegara	
		52 BULKU BERAU	116 Kab. Kutai Timur	Sapi potong
			117 Kab. Berau	
19	SULAWESI TENGAH	53 SULTENG 2	118 Kab. Sigi	Sapi potong
			119 Kab. Donggala	
20	SULAWESI SELATAN	54 SULSEL 1	120 Kab. Bantaeng	Sapi potong
			121 Kab. Bulukumba	
			122 Kab. Gowa	
			123 Kab. Maros	
		55 SULSEL 2	124 Kab. Barru	Sapi Potong
			125 Kab. Bone	

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS
11	DI YOGYAKARTA	28 DIY 1	59 Kab. Gunung Kidul	Sapi Potong
			60 Kab. Sleman	
			61 Kab. Kulonprogo	
			62 Kota Yogyakarta	
12	JAWA TIMUR	29 JATIM 1	63 Kab. Sumenep	Sapi Potong
			64 Kab. Bangkalan	
			65 Kab. Pamekasan	
		30 JATIM 3	66 Kab. Malang	Sapi Perah
			67 Kota Batu	
		31 JATIM 4	68 Kab. Lamongan	Sapi Potong
32 JATIM 5	69 Kab. Tuban	Sapi Potong		
33 JATIM 6	70 Kab. Lumajang	Kambing		
16	NUSA TENGGARA TIMUR	45 TIMOR	94 Kab. Kupang	Sapi Potong
			95 Kota Kupang	
			96 Kab. TTS	
			97 Kab. TTU	
			98 Kab. Belu	
		99 Kab. Malaka		
		46 FLORES BAGIAN B.	100 Kab. Ngada	Sapi Potong
			101 Kab. Nagekeo	
			102 Kab. Manggarai Timur	
		21	SULAWESI TENGGARA	56 SULTRA 1
127 Kab. Konawe Selatan				
58 SULTRA 3	128 Kab. Muna			Sapi Potong
22	SULAWESI BARAT	59 SUI BAR 1	129 Kab. Mamuju	Sapi Potong
23	MALUKU	60 GUGUS PULAU MALUKU BARAT DAYA	130 Kab. Maluku Barat Daya	Kambing Lakor
24	PAPUA	61 PAPUA 1	131 Kab. Merauke	Sapi Potong
			132 Kab. Jayapura	
		62 PAPUA 2	133 Kab. Keerom	Sapi Potong
			63 PAPUA 4	
		64 PAPUA 5	135 Kab. Jayawijaya	Babi
136 Kab. Yahukimo				
137 Kab. Lani Jaya				
25	PAPUA BARAT	65 SALAWATI	138 Kab. Sorong	Sapi Potong
		66 KEBAR	139 Kab. Tamberaw	Sapi Potong
		67 MOMI WAREN	140 Kab. Manokwarl Selatan	Sapi Potong
		68 BOMBERAY	141 Kab. Fakfak	Sapi Potong
69 MANOKWARI	142 Kab. Manokwarl	Sapi Potong		
26	SULAWESI UTARA	70 SULUT 1	143 Kab. Minahasa	Sapi Potong
27	MALUKU UTARA	71 MALUT 2	144 Kab. Halmahera Utara	Sapi Potong